

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini pemerintah semakin gencar mewujudkan sistem pengelolaan pemerintahan yang baik yang dikenal dengan nama *good governance*, konsep ini sudah banyak dipakai di Indonesia. Sejalan dengan tuntutan masyarakat sehingga semakin mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan yang terarah menuju terwujudnya pemerintahan yang baik. Penerapan *good governance* ditujukan demi kesejahteraan bersama, baik masyarakat, pemerintah, maupun sektor swasta (Pramudiana, 2017). Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah harus terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis, mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah berupa penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi yang mengacu kepada praktik-praktik akuntansi. Untuk keperluan tersebut dibuatlah standar akuntansi yang menjadi acuan dan pedoman bagi para akuntan yang berada dalam organisasi sektor publik. Dalam konteks organisasi sektor publik, diperlukan sebuah paket standar akuntansi tersendiri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikarenakan adanya kekhususan yang signifikan antara organisasi sektor publik dengan perusahaan swasta. Diantaranya adalah adanya kewajiban pertanggungjawaban kepada publik yang lebih besar antara penggunaan data-data yang dimiliki. Oleh karena itu, pemerintah menyusun suatu standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan presiden berupa Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan. Peraturan ini menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap Daerah Otonom Kabupaten/Kota maupun Propinsi dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akrual pada pemerintah daerahnya (Mentu dan Sondakh, 2016).

Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan. Tanpa adanya standar umum ini, maka format laporan yang dihasilkan tiap daerah akan berbeda-beda dan bisa mengakibatkan persoalan-persoalan. Oleh karena itu penting bagi setiap daerah untuk mengikuti standar umum ini. Dalam penyajian laporan keuangan tidak terlepas dari faktor pendukungnya yaitu sumber daya manusia dan perangkat pendukungnya berupa infrastruktur.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya yang pada giliran selanjutnya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga *good governance* dapat tercapai secara efektif.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2017 merupakan laporan keuangan yang disusun berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan dalam Tahun Anggaran 2017. Laporan keuangan ini terutama digunakan untuk: membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas keuangan Pemerintah Daerah, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur atas pertanggungjawaban OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan; serta dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut (Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai, 2017).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan umum penyusunan laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya; sedangkan tujuan spesifiknya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan (Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai, 2017).

Analisis laporan keuangan berarti “menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungan yang bersifat signifikan atau mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan yang tepat” (Harahap dalam Were dan Elin, 2015).

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa masalah yang menyangkut penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Dumai, antara lain:

Pertama, dalam laporan neraca Pemerintah Kota Dumai terdapat tigabelas akun dengan kode akun yang tidak sesuai dengan yang ada dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dalam PSAP 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan paragraf 9 dijelaskan bahwa “Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

entitas pelaporan. Laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan Atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan”. Dalam paragraf 12 juga dijelaskan bahwa “Catatan Atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan Atas Laporan Keuangan”. Kesalahan pada laporan keuangan ini akan mengakibatkan kesalahpahaman bagi pembaca untuk mengetahui jumlah nilai beserta rinciannya dari suatu akun dimana seharusnya kode akun berguna untuk mempermudah pengguna laporan keuangan untuk membaca laporan keuangan antara laporan neraca dan catatan atas laporan keuangannya. Seharusnya Pemerintah Kota Dumai menyajikan kode akun yang selaras antara laporan Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangannya.

Kedua, dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Dumai pada pos Belanja Operasi yang di dalam rinciannya terdapat akun Belanja Subsidi, saldo realisasi tahun 2016; akun tersebut tidak sama dengan saldo yang tertera pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang disajikan yaitu berjumlah Rp.0 pada LRA dan Rp.5.370.000.000,00 pada CALK. Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Dumai tidak wajar dalam menyajikan realisasi belanja subsidi pada tahun anggaran 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akibatnya, Realisasi Belanja Subsidi pada tahun anggaran 2016 menjadi terlalu rendah, dan menyebabkan Belanja Operasi menjadi terlalu rendah, sehingga penyajian Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2016 menjadi terlalu tinggi. Dalam PSAP 04 dijelaskan bahwa “Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya”. Seharusnya Pemerintah Kota Dumai menyajikan Realisasi Belanja Subsidi tahun anggaran 2016 sama dengan yang tertera pada Catatan Atas Laporan Keuangan agar tidak ada kesalahpahaman dalam membaca informasi yang disajikan.

Ketiga, dalam Laporan Realisasi Anggaran diketahui bahwa ada anggaran tersisa pada realisasi tahun 2017 yang ditunjukkan dengan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar 41,57%. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tepatnya pada PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, disebutkan bahwa manfaat informasi realisasi anggaran ada dua; yang pertama yaitu untuk menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi, dan manfaat kedua yaitu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Akibat dari rendahnya daya serap atau realisasi anggaran maka besar kemungkinan ada kegiatan yang tidak terlaksana dan menyebabkan ada anggaran yang tersisa sehingga menimbulkan keluhan dari masyarakat. Hal ini juga berarti bahwa kinerja pemerintah yang belum optimal. Seharusnya daya yang diserap bisa lebih tinggi dari 41,57% sehingga anggaran yang ada bisa diserap dengan maksimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa penyajian kode akun pada neraca Pemerintah Kota Dumai tidak selaras dengan catatan atas laporan keuangan?
2. Mengapa penyajian jumlah saldo Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Dumai tidak selaras dengan catatan atas laporan keuangan?
3. Mengapa daya serap realisasi anggaran Pemerintah Kota Dumai tahun anggaran 2017 sangat rendah?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui mengapa penyajian kode akun pada neraca Pemerintah Kota Dumai tidak selaras dengan catatan atas laporan keuangannya.
- b. Untuk mengetahui apakah penyajian jumlah saldo Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Dumai tidak selaras dengan catatan atas laporan keuangannya.
- c. Untuk mengetahui mengapa daya serap realisasi anggaran Pemerintah Kota Dumai tahun anggaran 2017 sangat rendah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Bagi pihak akademik
 - a. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat sebagai referensi penelitian selanjutnya.
 - b. Sebagai tambahan wacana akademik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Bagi pihak organisasi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran apakah laporan keuangan Pemerintah Kota Dumai sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku saat ini atau belum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis mengenai penyajian laporan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai, dan sebagai salah satu proses bagi penulis untuk semakin meningkatkan keterampilan dalam pembuatan karya tulis ilmiah.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan disusun berdasarkan bab demi bab yang akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang teori-teori penunjang dan penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis sebagai acuan.

BAB III : Gambaran Umum Pemerintahan Kota Dumai

Bab ini berisi tentang gambaran umum Kota Dumai, letak geografis, demografi, organisasi pemerintahan, kebijakan pembangunan, struktur organisasi Pemerintah Kota Dumai, dan metodologi penelitian.

BAB IV : Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran yang diharapkan bagi pihak yang berkepentingan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.